



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RENJA-PD)**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018**

TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA- PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang infrastruktur pada tahun berjalan yaitu 2018. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Perubahan RENJA tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2018 dan penutup serta lampiran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 ini didasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan Laporan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai 2018

Semoga Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapainya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2018 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196510251992031009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	16
2.1 EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU.....	16
2.2 PRAKIRAAN CAPAIAN DI TAHUN 2018.....	21
2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....	22
2.4 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	23
2.5 RIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	39
2.6 PENENTUAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	52

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	54
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN KEGIATAN.....	54
3.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	56
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	61
BAB IV PENUTUP.....	91
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); dengan adanya peraturan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun penjabaran tugas dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksanaan (proses, prosedur, mekanisme). Berikut tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pengoordinasian kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air :
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Penataan Ruang
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Fungsional

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan Renja ini telah mempedomani Visi, Misi dan Agenda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang sudah tertuang didalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta diselaraskan dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Sinjai.

Renja PD ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan masukan utama untuk pelaksanaan forum PD, yang dilanjutkan dengan penetapan RKPD. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, nantinya akan dilakukan penyempurnaan terhadap Renja ini, yang selanjutnya akan menjadi suatu keputusan.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018 yaitu : ***“Terwujudnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan perannya, misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;*
2. *Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan;*

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
27. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 21);
30. Keputusan Bupati Nomor 1018 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, yaitu :

1. Acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); tantangan dan peluang; serta formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun SKPD lainnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) PD Tahun Lalu

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu, dan realisasi RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran yang ada. Adapun penyebab sehingga seluruh kegiatan yang ada sudah tercapai adalah dengan adanya penambahan dana yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Sehingga pada tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017. Penyerapan anggaran pendapatan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Realisasi Pendapatan adalah Rp. 1.041.592.734,00 (Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan penyerapan anggaran belanja daerah sebesar Rp.180.590.745.917,06 (Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Enam Rupiah), dengan realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 177.568.280.805,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan 20 program dan 77 kegiatan didalamnya, yang semua kegiatan tersebut telah terealisasi, berikut Tabel 2.1 Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A 2017 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.1
 Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A 2017 yang dikelola
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi		% Realisasi
			Ya	Tidak	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	9	0	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9	9	0	100 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	0	100 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	0	100 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	4	4	0	100 %
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	17	17	0	100 %
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4	4	0	100 %
8	Program Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	1	1	0	100 %
9	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2	2	0	100 %
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	1	1	0	100 %
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	2	2	0	100 %
12	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	6	6	0	100 %
13	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	1	0	1	0 %
14	Program Pengendalian Banjir	1	1	0	100 %
15	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	3	0	100 %
16	Program Pengelolaan Area Pemakaman	1	1	0	100 %
17	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	3	1	2	33,33 %
18	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	3	3	0	100 %
19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Daerah	7	7	0	100 %
20	Program Perencanaan Tata Ruang	1	1	0	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2017

Tingkat penyerapan dana untuk seluruh program per 31 desember 2017 adalah sebesar Rp. 173.347.366.224,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 98,46% terhadap total nilai

yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2017 adalah 99,53%. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A 2017 yang dikelola
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

No	Program	Anggaran	Realisasi Penyerapan Anggaran	% Realisasi	
				Keu.	Fisik
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.473.575.470,00	Rp. 1.375.166.389,00	0,78	0,83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.943.291.700,00	Rp. 1.797.715.292,00	1,02	1,10
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 41.723.000,00	Rp. 41.723.000,00	0,02	0,02
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 140.000.000,00	Rp. 124.250.000,00	0,07	0,08
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 469.694.515,00	Rp. 469.694.515,00	0,27	0,27
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 132.784.170.753,06,00	Rp. 131.490.230.901,00	74,69	75,42
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 3.381.142.545,00	Rp. 3.368.698.045,00	1,91	1,92
8	Program Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	Rp. 114.585.000,00	Rp. 103.905.000,00	0,06	0,06
9	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Rp. 2.540.530.725,00	Rp. 2.535.059.059,00	1,44	1,44

10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Rp. 856.147.540,00	Rp. 850.110.540,00	0,48	0,49
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Rp. 641.180.000,00	Rp. 639.381.835,00	0,36	0,36
12	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp. 15.645.553.590,00	Rp. 15.492.419.987,00	8,80	8,86
13	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 0	Rp. 0	0	0
14	Program Pengendalian Banjir	Rp. 1.549.129.000,00	Rp. 1.548.963.000,00	0,88	0,88
15	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 944.234.680,00	Rp. 930.009.680,00	0,53	0,53
16	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Rp. 359.000.000,00	Rp. 245.753.000,00	0,14	0,20
17	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rp. 865.621.590,00	Rp. 812.640.590,00	0,46	0,48
18	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp. 223.298.500,00	Rp. 215.600.500,00	0,12	0,13
19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Daerah	Rp. 11.590.604.735,00	Rp. 10.850.467.596,00	6,16	6,16
20	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 495.980.000,00	Rp. 455.577.295,00	0,26	0,28
TOTAL		Rp. 176.059.463.343,06	Rp 173.347.366.224,00	98,46	99,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2017

2.2. Prakiraan Capaian di Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh PD pada priode satu tahun, yang berisikan program dan kegiatan PD tahun 2018. Dalam pelaksanaannya tentunya dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja :

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja PD, antara lain sebagai berikut :

- + Tersedianya anggaran yang tepat waktu;
- + Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- + Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu;
- + Sebagian kegiatan fisik perencanaannya telah dilakukan di tahun sebelumnya.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Renja PD, antara lain sebagai berikut :

- + Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan;
- + Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- + Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau pihak ketigakan sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relatif banyak;
- + Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan;

- ✚ Infrastruktur yang perlu dilakukan pemeliharaan melebihi asumsi awal;
- ✚ Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lainnya:

- ✚ Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi yang penting berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kegiatan-kegiatan konsultasi seperti Perencanaan, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah, Perencanaan Tata Ruang, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- ✚ Masih kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi

pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- ✚ Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan, namun semuanya telah dapat diselesaikan;

2.4. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan unsur pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembangunan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sedangkan fungsinya :

- ✚ Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ✚ Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- ✚ Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- ✚ Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- ✚ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja.

2.4.1. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Khususnya yang ada pada bidang :

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- ✚ Ketahanan Air;
- ✚ Tingginya kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air masih cukup tinggi;
- ✚ Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air masih kurang;
- ✚ Peralatan penunjang pelaksanaan urusan sumber daya air masih kurang;
- ✚ Konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya air masih sering terjadi.

2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

- ✚ Jaringan jalan kabupaten masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- ✚ Jaringan jalan khususnya jalur trayek masih belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana;
- ✚ Masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana;
- ✚ Sebagian ruas-ruas baru terutama infrastruktur pedesaan yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan kekurangan alokasi dana;
- ✚ Pembebanan berlebihan (Overloading) masih terjadi terutama pada ruas jalan kabupaten;
- ✚ Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas kabupaten dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan;
- ✚ Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan dan jembatan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
- ✚ Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara

penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (Ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan);

- ✚ Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dan jembatan dengan amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi pemanfaatan jaringan jalan kabupaten dan perdesaan.

3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

- ✚ Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni;
- ✚ Posisi Kabupaten Sinjai yang berada di kawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan;
- ✚ Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase;
- ✚ Belum efektifnya perencanaan dari bawah (Bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya dana pendukung perencanaan pembangunan;

- ✚ Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran;
- ✚ Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW;
- ✚ Posisi Kabupaten Sinjai yang berada di kawasan bencana alam memerlukan perencanaan pembangunan gedung yang terarah dan berkelanjutan.

4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

- ✚ Belum semuanya mempunyai RDTR produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;
- ✚ Meningkatnya kemampuan aparat perencanaan maupun pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif;
- ✚ Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

- ✚ Meningkatkan kapitalisasi konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- ✚ Meningkatkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- ✚ Meningkatkan kompetensi SDM konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi;
- ✚ Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan jasa konstruksi;
- ✚ Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang membidangi jasa konstruksi;
- ✚ Meningkatnya pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

2.4.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci indentifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai:

1) Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan di Bidang Sumber Daya Air Menurut Tugas dan Fungsi

Jenis Program	Permasalahan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	▪ Masih kurangnya kesadaran masyarakat/ organisasi petani dalam menyediakan akses saluran dan bangunan air untuk perencanaan pengembangan jaringan irigasi kedepan; ▪ Masih kurangnya rasa memiliki pada masyarakat khususnya pengguna air irigasi sehingga pemeliharaan jaringan selalu mengharapkan peran pemerintah; ▪ Organisasi P3A, GP3A, IP3A tidak aktif.
Program Penyediaan Air Baku	▪ Sumber-sumber air baku yang ada mengalami penurunan kualitas debit khususnya pada musim kemarau diakibatkan daerah tangkapan air (Cethment area) sudah banyak yang beralih fungsi.
Program Pengendalian Banjir	▪ Banyak penambangan liar pada aliran sungai yang merusak struktur sungai sehingga pada saat banjir, banyak meander sungai yang longsor/tergerus; ▪ Tidak adanya pengawasan ketat khususnya pada saat pelaksanaan pembangunan drainase kota, penentuan titik elevasi, sehingga terkesan drainase kota di kota sinjai mengikuti kontur jalan

2) Bidang Bina Marga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Bina Marga berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Permasalahan di Bidang Bina Marga Menurut Tugas dan Fungsi

Jenis Program	Permasalahan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kendala koordinasi program pembangunan jalan merupakan proses pembangunan lintas sektoral yang mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. Hal ini yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidak sesuaian perencanaan di tingkat daerah oleh karena keadaan daerah setempat, kondisi lahan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dari perkiraan awal. Peran koordinasi menjadi semakin penting dalam menjabarkan pembangunan yang direncanakan dari tingkat atas agar dapat dijabarkan di tingkat daerah tanpa mengganggu arah pembangunan nasional tetapi tetap mencapai sasaran mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misalyan, dengan adanya program dana desa, seringkali aparat desa menggunakan dana tersebut untuk membangun jalan di desa tersebut. Di satu sisi ruas jalan yang dibangun adalah termasuk ruas jalan kabupaten dimana wewenang pembangunan dan pemeliharaannya adalah tanggungjawab pemerintah daerah. Akibatnya terjadi permasalahan pada saat penyusunan inventarisasi aset pemerintah desa dan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena kurang koordinasi dari berbagai pihak sehingga terjadi kesalahan sasaran;

	▪ Pembebasan lahan juga sering kali menjadi hambatan saat pelaksanaan pembangunan jalan. Misalnya, pada saat dilakukan pelebaran jalan atau pembangunan saluran drainase, masyarakat yang bermukim di sepanjang ruas jalan yang akan dibangun seringkali menentang hal tersebut dengan tidak memberi izin kepada pihak penyedia jasa konstruksi /pelaksana di lapangan untuk menggunakan ruang manfaat jalan yang diklaim sebagai tanah milik mereka, dan seringkali menuntut ganti rugi sementara biaya untuk hal tersebut tidak dituangkan dalam anggaran, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai rencana pembangunan jalan atau tidak adanya perjanjian hitam diatas putih dalam hal ketersediaan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk kepentingan pelebaran jalan atau pembangunan saluran drainase yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah pada saat pelaksanaan pembangunan jalan; ▪ Laju kerusakan struktural jalan dipengaruhi dua faktor penting yaitu (1) Kendaraan berat dengan muatan lebih (Overloading), (2) Kondisi drainase permukaan jalan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	▪ Sarana dan prasarana yang kurang adalah aspal mixing plant mini yang kurang memadai. Kondisi AMP mini yang telah berumur mengakibatkan kualitas proses pencampuran material dalam pembuatan coldmix sebagai bahan utama dalam proses pelaksanaan pemeliharaan jalan dalam hal in pelaksanaan penambalan jalan yang berlubang kurang maksimal, sehingga pengadaan AMP mini perlu dilaksanakan untuk dapat menunjang dan mengoptimalkan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan

	Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Sinjai; ▪ Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pegawai merupakan instrumen penggerak utama suatu organisasi, karena tanpa adanya pegawai tentu aktifitas organisasi tidak dapat terlaksana. Kualitas dan jumlah pegawai juga sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tidak sebanding dengan luas jalan dan jumlah jembatan yang harus ditangani. Kemudian tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai maka kemampuan dalam melaksanakan tugas akan lebih baik, seiring dengan volumen pekerjaan yang semakin meningkat, maka tingkat jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada sekarang dirasakan kurang mampu untuk menjalankan tugas yang semakin berat; ▪ Persepsi pandangan dan rasa memiliki masyarakat, hambatan lain dari faktor eksternal dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah persepsi masyarakat tentang konsistensi. Persepsi masyarakat tentang konsistensi. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Dengan persepsi yang berkembang di masyarakat tersebut sehingga membuat masyarakat merasa tidak ada perubahan dengan kondisi jalan dan jembatan yang sering mereka lalui, selain itu rasa memiliki dalam masyarakat masih begitu kurang sehingga
--	---

	rasa kepedulian masyarakat begitu kurang memadai dalam menjaga struktural jalan dan jembatan; ▪ Kondisi alam menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemeliharaan dan lamanya kondisi jalan atau jembatan bertahan. Kondisi alam di Kabupaten Sinjai seperti yang diketahui kebanyakan daerah berbukit yang cukup curam. Tidak mudah untuk menaklukkan jalan dengan kondisi yang berbukit. Hal ini bisa menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lama dalam menangani pemeliharaan jalan dan jembatan.
--	--

3) Bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Cipta Karya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan di Bidang Bina Marga Menurut Tugas dan Fungsi

Jenis Program	Permasalahan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	▪ Belum adanya rencana induk tentang air bersih; ▪ Belum lengkapnya basis data tentang air bersih; ▪ Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
Program Pengembangan Perumahan	▪ Kurangnya data mengenai kawasan permukiman dan perumahan; ▪ Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kab. Sinjai.
Program Lingkungan Sehat Perumahan	▪ Belum tersedianya master plan drainase yang memadai; ▪ Sering terjadinya banjir kota

	karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	▪ Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir dan longsor.

4) Bidang Penataan Ruang

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

*Tabel 2.6
Permasalahan di Bidang Penataan Ruang Menurut
Tugas dan Fungsi*

Jenis Program	Permasalahan
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	▪ Belum ada peraturan kepala daerah tentang pengenaan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang; ▪ Belum regulasi yang mengatur tentang Zoning Regulation (Peraturan zonasi); ▪ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang.
Program Perencanaan Tata Ruang	▪ Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis memiliki rencana detail disertai dengan peraturan zonasi; ▪ Belum adanya perencanaan mengenai ruang terbuka hijau (RTH);

	▪ Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.
Program Pemanfaatan Ruang	▪ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang; ▪ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

5) Bidang Jasa Konstruksi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.7
Permasalahan di Bidang Jasa Konstruksi Menurut
Tugas dan Fungsi

Jenis Program	Permasalahan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	▪ Pemahaman Badan Usaha Jasa Konstruksi tentang peraturan perundang-undangan masih rendah; ▪ Penetapan regulasi dan standar K3 di pekerjaan konstruksi masih sangat jauh dari standar ideal; ▪ Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi; ▪ Kurangnya standard dan pedoman pelaksanaan pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi

2.4.3. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Meliputi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor rill dan sistem logistik daerah dan nasional;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaatan jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan yang ada;
- 4) Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah;
- 5) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah diantara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet;
- 6) Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global;
- 7) Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan;

- 8) Penambahan sarana dan prasarana alat-alat berat;
- 9) Kelembagaan P3A belum berbadan hukum;
- 10) Kelembagaan P3A masih kurang dalam pengelolaan organisasi dan pengelolaan irigasi;
- 11) Pertambahan jaringan irigasi;
- 12) Ketersediaan air untuk pelayanan irigasi terbatas;
- 13) Keterbatasan tenaga pengelola O & P;
- 14) Belum tersedianya data aset irigasi yang memadai;
- 15) Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih, Drainase, Jalan Lingkungan;
- 16) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam sesuatu wilayah administrasi;
- 17) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan segian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
- 18) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengelolaan maupun pembiayaan penyediaan air minum;
- 19) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan;
- 20) Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan;

- 21) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan dan rawan kriminalitas;
- 22) Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan;
- 23) Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan;
- 24) Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- 25) Meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.4.4. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Meliputi:

- 1) Susunan oreganisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerahn Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Nomor 59 Tahun 2016;

- 2) Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 3) Pemberdayaan Unit-Unit Pelayanan Teknis dan komitmen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan berkualitas;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor;
- 5) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota;
- 6) Tersedianya akses air minum dengan cluster pelayanan sangat baik;
- 7) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota maupun desa;
- 8) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya;
- 9) Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

2.5. Reviw Terhadap Rencana Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat dari berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder, dan pemerintah sendiri. Rancanagan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arahan kebijakan

keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan RKT OPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan untuk tahun yang direncanakan.

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses Bottom Up melalui mekanisme musrembang yang disesuaikan dengan hasil Renstra Kabupaten Sinjai, kemudian disesuaikan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dan predikat tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Tabel 2.8
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.SINJAI

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				KET
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.452.279.350,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.365.491.350,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	166.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	168.500.000,00	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasi	59 Unit	82.225.000,00	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasi	59 Unit	82.225.000,00	
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Bulan	23.000.000,00	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Bulan	23.000.000,00	
	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan SKPD yang baik	12 Bulan	137.234.850,00	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan SKPD yang baik	12 Bulan	49.634.850,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB II**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	
	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	12 Bulan	14.256.000,00	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	12 Bulan	13.068.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi	100 %	776.300.400,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi	100 %	867.887.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	192.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	191.312.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	93.250.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	93.150.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21 Unit	183.500.400,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21 Unit	275.875.000,00	
	Pengadaa Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	Pengadaa Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	37 Unit	189.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	37 Unit	189.500.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	37 Unit	14.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	37 Unit	14.800.000,00	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	61 Unit	21.350.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	61 Unit	21.350.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Lulus Ujian Sertifikasi	50%	140.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Lulus Ujian Sertifikasi	50%	138.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1 Ls	140.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1 Ls	138.000.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	
	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	

5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	124.908.239.991,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	126742638406,00	
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah Jembatan	5.770.250.000,00	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah Jembatan	5.708.884.000,00	
	Peningkatan Jalan DAU	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,279 Km	37.644.123.961,00	Peningkatan Jalan DAU	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,279 Km	38.740.040.651,00	
	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	301.870.000,00	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	287.082.000,00	
	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,28 Km	80.052.875.000,00	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,28 Km	79.973.155.000,00	
	Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	Terwujudnya Perintisan/ Pelebaran jalan	1 Ruas Jalan	500.000.000,00	Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	Terwujudnya Perintisan/ Pelebaran jalan	1 Ruas Jalan	495.590.000,00	
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	604.095.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	568.089.000,00	
	Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka baja Jembatan tallo	Tersedianya Data Hasil Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dari dirjen Bina marga Kementerian Pekerjaan Umum RI	1 Dokumen	35.026.030,00	Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka baja Jembatan tallo	Tersedianya Data Hasil Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dari dirjen Bina marga Kementerian Pekerjaan Umum RI	1 Dokumen	35.026.030,00	
					Peningkatan Jalan DAU (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Jalan	22 Paket	593.850.025,00	

					DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Jalan	1 Paket	340.921.700,00	
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman yang tertata	10 Ha	14.336.693.000,00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman yang tertata	10 Ha	13.967.381.000,00	
		Rumah Tangga Bersanitasi	80 RT				80 RT		
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan bagi Masyarakat di Permukiman	0,40 Km	684.193.000,00	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan bagi Masyarakat di Permukiman	0,25 Km	404.518.000,00	
	Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1140 M ²	1.188.000.000,00	Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1140 M ²	1.133.693.000,00	
	Pembangunan Drainase	Terciptanya Lingkungan Permukiman Yang Sehat	4,210 Km	3.926.500.000,00	Pembangunan Drainase	Terciptanya Lingkungan Permukiman Yang Sehat	4,210 Km	3.926.500.000,00	
	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	27 RT	100.000.000,00	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	27 RT	97.720.000,00	
	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SAnitasi	12 Unit	6.438.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SAnitasi	12 Unit	6.404.950.000,00	
	Air Limbah Setempat APBN TA.2018	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	Air Limbah Setempat APBN TA.2018	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	
7	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan	62,26 %	3.600.400.000,00	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan	62,26 %	3.600.400.000,00	
		- Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97,84 %			- Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97,84 %		
	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	45 KM	2.989.075.000,00	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	45 KM	2.989.075.000,00	

	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam Kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam Kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Dan Prasarana Olah Raga Yang Tersedia	4 Unit	1.504.300.680,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Dan Prasarana Olah Raga Yang Tersedia	4 Unit	1.464.184.680,00	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	3 Unit	1.504.300.680,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	3 Unit	1.458.184.680,00	
					Peningkatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Olahraga (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan PrasaranaOlah Raga Yang Tersedia	1 Paket	6.000.000,00	
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang Terpenuhi	100 %	724.874.940,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang Terpenuhi	100 %	724.374.940,00	
	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan	Terwujudnya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan Yang Siap Pakai	6 Unit	29.643.980,00	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan	Terwujudnya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan Yang Siap Pakai	6 Unit	29.643.980,00	
	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4 Unit	144.144.000,00	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4 Unit	144.144.000,00	
	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	18 Unit	551.086.960,00	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	18 Unit	550.586.960,00	
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	10.000 Ha	19.160.240.500,00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	10.000 Ha	19.116.263.500,00	
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT			Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB II**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.953.492.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.947.492.800,00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DAU	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi	861 Ha	2.995.500.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi DAU	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi	861 Ha	2.941.176.000,00	
	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	8 DI	5.356.500.000,00	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	8 DI	5.330.852.000,00	
	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	251.505.000,00	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	244.645.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	236.900.000,00	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	232.280.000,00	
	Perencanaan Air bersih Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	1 Dokumen	195.000.000,00	Perencanaan Air bersih Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	1 Dokumen	186.620.000,00	
	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Yang Optimal, Efisien, Efektif, dan Terukur	1 Dokumen	35.700.000,00	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Yang Optimal, Efisien, Efektif, dan Terukur	1 Dokumen	35.700.000,00	
	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	1 Dokumen	412.000.000,00	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	1 Dokumen	400.825.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian Air Irigasi	32 DI	330.062.700,00	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian Air Irigasi	32 DI	330.062.700,00	
	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	1050 Unit	4.237.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	1050 Unit	4.208.780.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB II**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	150 Unit	916.000.000,00	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	150 Unit	911.750.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	120 Unit	1.200.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	120 Unit	1.200.000.000,00	
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Lanjutan)	Tersedianya Sumur Bor Bagi Rumah Tangga di Perdesaan	1 Unit	102.500.000,00	
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Pembuatan SUMUR Bor	1 Paket	3.000.000,00	
11	Program Pengendalian Banjir	Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan (m)	2.000 m	2.496.150.000,00	Program Pengendalian Banjir	Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan (m)	2.000 m	2.420.244.000,00	
	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi Dampak Erosi Sepanjang Aliran Sungai dan Mencegah Meluapnya Aliran Sungai Kepermukiman	725 m	2.496.150.000,00	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi Dampak Erosi Sepanjang Aliran Sungai dan Mencegah Meluapnya Aliran Sungai Kepermukiman	725 m	2.420.244.000,00	
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ber HPL/HGB	0,60 Ha	3.342.342.680,00	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ber HPL/HGB	0,60 Ha	2.038.597.680,00	
	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Tersebar di Kec. Sinjai Utara	150.184.680,00	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Tersebar di Kec. Sinjai Utara	148.984.680,00	
	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten Sinjai	Tersedianya Gerbang/Batas Kota	1 Unit	1.090.000.000,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten Sinjai	Tersedianya Gerbang/Batas Kota	1 Unit	30.000.000,00	
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya ruang terbuka hijau	0,50 Ha	2.102.158.000,00	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya ruang terbuka hijau	0,50 Ha	1.859.613.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB II**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

13	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	359.000.000,00	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	356.150.000,00	
	Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 Lokasi	359.000.000,00	Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 Lokasi	356.150.000,00	
14	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.054.108.150,00	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.014.048.150,00	
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan saran dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.054.108.150,00	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan saran dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.014.048.150,00	
15	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Bagi Aparatur dan Penyedia Jasa	100 Orang	31.312.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Bagi Aparatur dan Penyedia Jasa	100 Orang	31.312.000,00	
	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tersedia	12 Unit	16.344.083.224,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tersedia	12 Unit	16.662.709.924,00	
	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun di ibu kota kecamatan kab. sinjai	1 Unit	645.000.000,00	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun di ibu kota kecamatan kab. sinjai	1 Unit	628.668.800,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB II**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.867.733.024,00	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.771.178.024,00	
	Pembangun Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit	2.490.500.000,00	Pembangun Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit	2.422.183.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.269.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.166.303.000,00	
	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai Valid	2 Dokumen	20.280.000,00	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai Valid	2 Dokumen	20.280.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Prasarana Umum	Tersedianya peneranga lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Prasarana Umum	Tersedianya peneranga lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	
	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	95.270.200,00	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	65.270.200,00	
					Pembangunan Gedung Kantor (DAU) (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai	1 Paket	5.000.000,00	
					Pembangunan Tempat Ibadah (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Islamic Center	1 Unit (8,3% Target Tercapai)	627.526.900,00	
17	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	1 Dok. RDTR	214.236.240,00	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	1 Dok. RDTR	214.236.240,00	

	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	
	Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	

2.6. Penentuan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penentuan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan dengan cara mekanisme Musrenbang dan Forum.

Musrenbang

Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up dimana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Maksud diadakan Musrenbang adalah Petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang ini sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Adapun Tujuan Musrenbang yakni :

1. Terlaksananya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
2. Membangun mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang yang lebih partisipatif).
3. Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat.
4. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Forum

Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tata cara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.

Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah :

1. Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. Menyusun prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD disertai plafon/pagu dana SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
3. Menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD dan prioritas usulan kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Maka dari itu, dalam Rangka Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut, bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai selama lima tahun.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran misi dan merupakan suatu (What) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurung waktu tertentu (When) yang biasanya ditetapkan antara satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan target yang bersifat kualitatif yang menjadi acuan dan ukuran keberhasilan kinerja organisasi yang bersangkutan. Tujuan bersifat idealis dan mempunyai jangkauan kedepan yang menjadi target capaian suatu organisasi.

Dalam menjamin eksis dan berkembangnya suatu organisasi dalam kondisi lingkungan yang berubah, organisasi senantiasa dituntut untuk mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan faktor kunci keberhasilan seefektif mungkin.

Tujuan akan mengimplementasikan atau menjabarkan misi suatu organisasi dan merupakan target yang dicapai atau dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan misi yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

MISI I

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Misi ini bertujuan untuk:

- ☑ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan, dengan **Indikator Tujuan** Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) dan Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi Baik (%) dengan **Sasaran** *Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan, sedangkan Indikator Sasaran adalah :*

≈ *Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)*.

≈ *Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)*

- ☑ Meningkatkan Pelayanan Irigasi dan Kawasan Permukiman, Budidaya dari Ancaman Bahaya Banjir, dengan **Indikator Tujuan** Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha) dan Cakupan Wilayah daerah Aliran Sungai (DAS) dan daerah Banjir yang dikendalikan (M) dengan **Sasaran** *Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air, sedangkan Indikator Sasaran adalah:*

≈ *Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)*.

≈ *Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m)*

- ☑ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman dengan **Indikator Tujuan** Rumah Tngga Bersanitasi, Luas Permukiman yang Tertata, dan Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dengan **Sasaran** antara lain:

 - ≈ Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air/Air Minum Perdesaan, dengan **Indikator Sasaran** Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Pedesaan.
 - ≈ Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan dan Permukiman dengan **Indikator Sasaran**:
 - a. Rumah Tangga Bersanitasi
 - b. Luas Permukiman yang Tertata
- ☑ Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman dengan **Indikator Sasaran** Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
- ☑ Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dengan **Indikator Tujuan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah yang tersedia, **dengan Sasaran** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dan **Indikator Sasaran** adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang tersedia.
- ☑ Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan **Indikator Tujuan** Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia, dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olah

Raga, dan **Indikator Sasaran** Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia.

MISI II

Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk:

- ☑ Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya, dengan **Indikator Tujuan** Ketaatan terhadap RTRW dengan **Sasaran** antara lain:
 - ≈ Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan **Indikator Sasaran** Persentase Penerbitan IMB yang sesuai dengan arahan RTRW.
 - ≈ Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan **Indikator Sasaran** Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW.
 - ≈ Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan **Indikator Sasaran** Luas wilayah berHPL/HGB.
 - ≈ Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang fungsional dengan **Indikator Sasaran** Luas Ruang Terbuka Hijau berHPL/HGB.

- ☑ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan **Indikator Tujuan** Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa/Kelurahan, dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan, dan **Indikator Sasaran** adalah Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa/Kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				KET
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.452.279.350,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.365.491.350,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	166.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	168.500.000,00	Pagu Berubah
	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasi	59 Unit	82.225.000,00	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasi	59 Unit	82.225.000,00	
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Bulan	23.000.000,00	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Bulan	23.000.000,00	
	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan SKPD yang baik	12 Bulan	137.234.850,00	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan SKPD yang baik	12 Bulan	49.634.850,00	Pagu Berubah
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	
	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	12 Bulan	14.256.000,00	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	12 Bulan	13.068.000,00	Pagu Berubah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yan Terpenuhi	100 %	776.300.400,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yan Terpenuhi	100 %	867.887.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	7 Unit	192.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	5 Unit	191.312.000,00	Pagu Berubah
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	93.250.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	93.150.000,00	Pagu Berubah
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21 Unit	183.500.400,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21 Unit	275.875.000,00	Pagu Berubah
	Pengadaa Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	Pengadaa Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	189.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	189.500.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	37 Unit	14.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	37 Unit	14.800.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	61 Unit	21.350.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	61 Unit	21.350.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Lulus Ujian Sertifikasi	50%	140.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Lulus Ujian Sertifikasi	50%	138.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1 Ls	140.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1 Ls	138.000.000,00	Pagu Berubah
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	

	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	
	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	124.908.239.991,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	126.742.638.406,00	
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah Jembatan	5.770.250.000,00	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah Jembatan	5.738.884.000,00	Pagu Berubah
	Peningkatan Jalan DAU	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,279 Km	37.644.123.961,00	Peningkatan Jalan DAU	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,279 Km	38.710.040.651,00	Pagu Berubah
	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	301.870.000,00	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	287.082.000,00	Pagu Berubah
	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,28 Km	80.052.875.000,00	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,28 Km	79.973.155.000,00	Pagu Berubah
	Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	Terwujudnya Perintisan/ Pelebaran jalan	1 Ruas Jalan	500.000.000,00	Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	Terwujudnya Perintisan/ Pelebaran jalan	1 Ruas Jalan	495.590.000,00	Pagu Berubah

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	604.095.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	568.089.000,00	Pagu Berubah
	Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka baja Jembatan tallo	Tersedianya Data Hasil Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dari dirjen Bina marga Kementrian Pekerjaan Umum RI	1 Dokumen	35.026.030,00	Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka baja Jembatan tallo	Tersedianya Data Hasil Penilaian Atas Jembatan rangka baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dari dirjen Bina marga Kementrian Pekerjaan Umum RI	1 Dokumen	35.026.030,00	
					Peningkatan Jalan DAU (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Jalan	22 Paket	593.850.025,00	Kegiatan Baru
					DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Jalan	1 Paket	340.921.700,00	Kegiatan Baru
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman yang tertata	10 Ha	14.336.693.000,00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman yang tertata	10 Ha	15.967.381.000,00	
		Rumah Tangga Bersanitasi	80 RT			Rumah Tangga Bersanitasi	80 RT		
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan bagi Masyarakat di Permukiman	0,40 Km	684.193.000,00	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan bagi Masyarakat di Permukiman	0,25 Km	1.404.518.000,00	Target dan Pagu Berubah
	Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1140 M ²	1.188.000.000,00	Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1140 M ²	1.133.693.000,00	Pagu Berubah
	Pembangunan Drainase	Terciptanya Lingkungan Permukiman Yang Sehat	4,210 Km	3.926.500.000,00	Pembangunan Drainase	Terciptanya Lingkungan Permukiman Yang Sehat	4,210 Km	4.926.500.000,00	Pagu Berubah
	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	27 RT	100.000.000,00	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	27 RT	97.720.000,00	Pagu Berubah
	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	12 Unit	6.438.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi	12 Unit	6.404.950.000,00	Pagu Berubah

	Air Limbah Setempat APBN TA.2018	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	Air Limbah Setempat APBN TA.2018	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	
7	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	3.600.400.000,00	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dan - Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26 % 97,84 %	3.600.400.000,00	
	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	45 KM	2.989.075.000,00	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	45 KM	2.989.075.000,00	
	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam Kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam Kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Dan Prasarana Olah Raga Yang Tersedia	4 Unit	1.504.300.680,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Dan Prasarana Olah Raga Yang Tersedia	4 Unit	1.464.184.680,00	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	3 Unit	1.504.300.680,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	3 Unit	1.458.184.680,00	Pagu Berubah
					Peningkatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Olahraga (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Yang Tersedia	1 Paket	6.000.000,00	Kegiatan Baru
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang Terpenuhi	100 %	724.874.940,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang Terpenuhi	100 %	724.374.940,00	

	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinarmargaan	Terwujudnya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinarmargaan Yang Siap Pakai	6 Unit	29.643.980,00	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinarmargaan	Terwujudnya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinarmargaan Yang Siap Pakai	6 Unit	29.643.980,00	
	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	4 Unit	144.144.000,00	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	4 Unit	144.144.000,00	
	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	18 Unit	551.086.960,00	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	18 Unit	550.586.960,00	Pagu Berubah
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	10.000 Ha	19.160.240.500,00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	10.000 Ha	20.116.263.500,00	
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT			Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT		
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.953.492.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.947.492.800,00	Pagu Berubah
	Peningkatan Jaringan Irigasi DAU	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi	861 Ha	2.995.500.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi DAU	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi	861 Ha	2.941.176.000,00	Pagu Berubah
	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	8 DI	5.356.500.000,00	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	8 DI	5.330.852.000,00	Pagu Berubah
	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	251.505.000,00	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	244.645.000,00	Pagu Berubah
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	236.900.000,00	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	232.280.000,00	Pagu Berubah
	Perencanaan Air bersih Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	1 Dokumen	195.000.000,00	Perencanaan Air bersih Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	1 Dokumen	186.620.000,00	Pagu Berubah
	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Yang Optimal, Efesien, Efektif, dan Terukur	1 Dokumen	35.700.000,00	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Yang Optimal, Efesien, Efektif, dan Terukur	1 Dokumen	35.700.000,00	
	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	1 Dokumen	412.000.000,00	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	1 Dokumen	400.825.000,00	Pagu Berubah
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian Air Irigasi	32 DI	330.062.700,00	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian Air Irigasi	32 DI	330.062.700,00	
	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	1050 Unit	4.237.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	1050 Unit	4.208.780.000,00	Pagu Berubah
	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	150 Unit	916.000.000,00	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	150 Unit	911.750.000,00	Pagu Berubah
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	120 Unit	1.200.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan Air Bersih/ Air Minum bagi Rumah Tangga di perdesaan	120 Unit	2.200.000.000,00	Pagu Berubah
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Lanjutan)	Tersedianya Sumur Bor Bagi Rumah Tangga di Perdesaan	1 Unit	102.500.000,00	Kegiatan Baru
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Pembuatan SUMUR Bor	1 Paket	3.000.000,00	Kegiatan Baru
11	Program Pengendalian Banjir	Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan (m)	2.000 m	2.496.150.000,00	Program Pengendalian Banjir	Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan (m)	2.000 m	2.420.244.000,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi Dampak Erosi Sepanjang Aliran Sungai dan Mencegah Meluapnya Aliran Sungai Kepermukiman	725 m	2.496.150.000,00	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi Dampak Erosi Sepanjang Aliran Sungai dan Mencegah Meluapnya Aliran Sungai Kepermukiman	725 m	2.420.244.000,00	Pagu Berubah
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ber HPL/HGB	0,60 Ha	3.342.342.680,00	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ber HPL/HGB	0,60 Ha	2.038.597.680,00	
	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Tersebar di Kec. Sinjai Utara	150.184.680,00	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Tersebar di Kec. Sinjai Utara	148.984.680,00	Pagu Berubah
	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten Sinjai	Tersedianya Gerbang/Batas Kota	1 Unit	1.090.000.000,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten Sinjai	Tersedianya Gerbang/Batas Kota	1 Unit	30.000.000,00	Pagu Berubah
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya ruang terbuka hijau	0,50 Ha	2.102.158.000,00	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya ruang terbuka hijau	0,50 Ha	1.859.613.000,00	Pagu Berubah
13	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	359.000.000,00	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	356.150.000,00	
	Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 Lokasi	359.000.000,00	Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 Lokasi	356.150.000,00	Pagu Berubah
14	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.054.108.150,00	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.014.048.150,00	
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.054.108.150,00	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.014.048.150,00	Pagu Berubah
15	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Bagi Aparatur dan Penyedia Jasa	100 Orang	31.312.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Bagi Aparatur dan Penyedia Jasa	100 Orang	31.312.000,00	
	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tersedia	12 Unit	16.344.083.224,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tersedia	12 Unit	17.569.888.904,00	
	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun di ibu kota kecamatan kab. sinjai	1 Unit	645.000.000,00	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun di ibu kota kecamatan kab. sinjai	1 Unit	628.668.800,00	<i>Pagu Berubah</i>
	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.867.733.024,00	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.771.178.024,00	<i>Pagu Berubah</i>
	Pembangun Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit	2.490.500.000,00	Pembangun Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit	23.049.709.900,00	<i>Pagu Berubah</i>
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.269.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.166.303.000,00	<i>Pagu Berubah</i>
	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai Valid	2 Dokumen	20.280.000,00	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai Valid	2 Dokumen	20.280.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Prasarana Umum	Tersedianya peneranga lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Prasarana Umum	Tersedianya peneranga lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	

	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	95.270.200,00	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	65.270.200,00	Pagu Berubah
					Pembangunan Gedung Kantor (DAU) (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai	1 Paket	5.000.000,00	Kegiatan Baru
					Hibah Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung yang dihibahkan	2 Unit	907.178.980,00	Kegiatan Baru
17	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	1 Dok. RDTR	214.236.240,00	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	1 Dok. RDTR	214.236.240,00	
	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	
	Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA 2018)

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.365.491.350	0	0
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	168.500.000	0	0
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bln	82.225.000	0	0
3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan Kantor	1 Paket	150.000.000	0	0
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik. Penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000	0	0
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	23.000.000	0	0
6. Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	12 Bln	123.063.500	0	0

7. Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD yang baik	12 Bln	49.634.850	0	0
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultansi dalam dan luar daerah	12 Bln	750.000.000	0	0
9. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	12 Bulan	13.068.000	0	0
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana yang terpenuhi	100 %	867.887.000	0	0
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas	7 Unit	191.312.000	0	0
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	14 Unit	93.150.000	0	0
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	21 Unit	275.875.000	0	0
4. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000	0	0
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	50.000.000	0	0
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	189.500.000	0	0
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	37 Unit	14.800.000	0	0
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	61 Unit	21.350.000	0	0

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang lulus sertifikasi	50 %	138.000.000	0	0
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1 ls	138.000.000	0	0
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	295.767.315	0	0
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2016	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	10.152.380	0	0
2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya pelaporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan	12 Lap	28.636.400	0	0
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Tersedianya laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Lap	143.634.700	0	0
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dok	113.343.835	0	0
V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan 2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26% 97,84%	126.742.638.406	0	0
1. Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah	5.738.884.000	0	0
2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan	1 Dok	287.082.000	0	0

3. Peningkatan Jalan DAU	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	27,697 Km	38.710.040.651	0	0
4. Peningkatan Jalan DAU (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Jalan	22 Paket	593.850.025	0	0
5. DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	64,489 Km	79.973.155.000	0	0
6. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	Terwujudnya perintisan/ pelebaran jalan	1,3 Km	495.590.000	0	0
7. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dok	568.089.000	0	0
8. Penilaian Atas Jembatan Rangka Baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo	Tersedianya Data hasil Penilaian Atas Jembatan Rangka baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dari Dirjen Bina marga Kementerian Pekerjaan Umum RI	1 Laporan	35.026.030	0	0
9. DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan (Utang)	Terlaksananya Prmbiayaanan Jalan	1 Paket	340.9210.700	0	0
VI. Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Rumah Tangga Bersanitasi 2. Permukiman Yang Tertata	80 RT 10 Ha	15.967.381.000	0	0
1. Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	27 RT	97.720.000	0	0
2. Pembangunan Drainase	Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat	5,375 Km	4.926.500.000	0	0
3. Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1,210 M2	1.133.693.000	0	0
4. Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya jalan lingkungan bagi masyarakat dipermukiman	1,26 Km	1.404.518.000	0	0
5. DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya cakupan pelayanan	12 Unit	6.404.950.000	0	0

	sanitasi				
6. Air Limbah Setempat APBD TA 2018	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	1.000 KK	2.000.000.000	0	0
VII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan 2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	62,26% 97,84%	3.600.400.000	0	0
1. Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik	45 Km	2.989.075.000	0	0
2. Pemeliharaan jembatan	Tersedianya jembatan dalam kondisi baik	6 Buah	611.325.000	0	0
VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia	4 Unit	1.464.184.680	0	0
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Optimalnya sarana dan prasarana olahraga	3 Unit	1.458.184.680	0	0
2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Tersedia	1 Paket	6.000.000	0	0
IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat Yang Terpenuhi	100 %	724.374.940	0	0
1. Pengadaan Alat - alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	4 Unit	144.144.000	0	0
2. Pemeliharaan Alat – alat Laboratorium	Terwujudnya pemeliharaan alat-alat laboratorium yang siap pakai	6 Unit	29.643.980	0	0
3. Pemeliharaan Alat – alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	18 Unit	550.586.960	0	0

X. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Cakupan pelayanan irigasi (Ha) 2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	10.000 (Ha) 50464 RT	20.116.263.500	0	0
1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.947.492.800	0	0
2. Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU	Optimalnya kembali fungsi jaringan irigasi	861 Ha	2.941.176.000	0	0
3. Dak Penugasan Bidang Irigasi	Optimalnya kembali fungsi jaringan irigasi	397 Ha	5330.852.000	0	0
4. Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Bh	244.645.000	0	0
5. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dok	232.280.000	0	0
6. Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya dokumen pemutakhiran data irigasi	1 Dok	40.580.000	0	0
7. Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal, efesien, efektif, dan terukur	1 Dok	35.700.000	0	0
8. Perencanaa Air Bersih tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih	1 Dok	186.620.000	0	0
9. DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	1050 Unit	4.208.780.000	0	0
10. DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianyan jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	150 Unit	911.750.000	0	0
11. Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya dokumen data kebutuhan air bersih	1 Dok	400.825.000	0	0
12. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian air irigasi	32 DI	330.062.700	0	0

13. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga dipedesaan	120 Unit	2.200.000.000	0	0
14. Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Lanjutan)	Tersedianya Sumur Borbagi Rumah Tangga di Pedesaan	1 Unit	102.500.000	0	0
15. Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Utang)	Terlaksananya Pembiayaan Pembuatan Sumur Bor	1 Paket	3.000.000	0	0
XI. Program Pengendalian Banjir	Cakupan wilayah Derah Aliran Sungai (DAS) dan daerah banjir yang dikendalikan (m)	725 m	2.420.244.000	0	0
1. Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi dampak erosi sepanjang aliran sungai dan mencegah meluapnya aliran sungai ke pemukiman	725 m	2.420.244.000	0	0
XII Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB	0,60 Ha	2.038.597.680	0	0
1. Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya penataan keasrian dan estetika kota	1 Kec	148.984.680	0	0
2. Penataan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	0,50 Ha	1.859.613.000	0	0
3. Pembangunan Gerbang Batas Kota kabupaten Sinjai	Tersedianya Gerbang /Batas Kota	1 Unit	30.000.000	0	0
XIII Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa	15 Lokasi	356.150.000	0	0
1. Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 Lokasi	356.150.000	0	0
XIV. Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan	3 Paket	1.126.927.125	0	0

	Masyarakat				
1. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.014.048.150	0	0
XV. Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450	0	0
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan bagi aparatur dan penyedia jasa	100 Org	31.312.000	0	0
2. Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450	0	0
XVI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Daerah)	Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang tersedia	12 Unit	17.569.888.904	0	0
1. Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun lapangan diibu kota kecamatan Kabupaten Sinjai	1 Unit	628.668.800	0	0
2. Pembangunan Gedung/Kantor (DAU)	Tersedianya bangunan gedung kantor milik pemerintah	8 Unit	7.771.178.024	0	0
3. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor pemerintah kabupaten Sinjai	6 Unit	3.166.303.000	0	0
4. Pembangunan Tempat Ibadah	Tersedianya tempat ibadah	1 Unit	3.049.709.900	0	0
5. Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai valid	2 Dok	20.280.000	0	0
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum	Tersedianya penerangan lampu jalan	12 Bln	1.956.300.000	0	0

	di kabupaten sinjai				
7. Pengelolaan Ijin Mendirikan bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Sinjai	150 IMB	65.270.200	0	0
8. Pembangunan gedung kantor (DAU) (UTANG)	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Pemerintah kabupaten Sinjai	1 Paket	5.000.000	0	0
9. Hibah Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor Yang dihibahkan	2 Unit	907.178.980	0	0
XVII. Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai Dengan Arah RTRW	0	0	4 Dok	2.119.826.610
1. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	1 Perda	74.488.280	0	0
2. Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya dokumen KLHS kawawas perkotaan Lappadata	1 Dok	139.747.960	0	0
I. Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	0	0	100 %	2.328.862.326
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0	0	100 Orang	47.130.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	0	0	12 Bulan	191.475.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pengesahan	0	0	12 Bulan	94.558.750

Operasional	kelengkapan				
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	0	0	6 Unit	51.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	1 Paket	172.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	0	0	10 Unit	106.600.000
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	0	0	15 Unit	51.250.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	0	12 Bulan	6.890.971
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	12 Bulan	26.450.000
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kesekretariatan	0	0	12 Bulan	176.343.825
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	0	0	12 Laporan	65.006.180
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	0	12 Bulan	862.500.000
Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS	0	0	12 Bulan	14.580.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	0	0	12 Bulan	56.277.600

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	0	0	12 Bulan	203.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	0	12 Bulan	16.800.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	0	12 Bulan	24.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	12 Bulan	161.000.000
II. Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan pelaporan Kinerja	0	0	100 %	375.729.440
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	1 Dokumen	13.635.830
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	0	0	5 Dokumen	131.067.060
Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	0	0	12 Laporan	32.235.975
Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	0	0	12 Laporan	163.790.575
Pengelolaan Website	Up dating Informasi di website	0	0	12 Bulan	35.000.000
III. Program Keciptakarya	Cakupan Pemenuhan pelaporan Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	0	0	84%	102.956.021.180

	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	0		69%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah kabupaten Sinjai	0		13 Unit	
Pembangunan Gedung Kantor	Bertambahnya Sarana Perkantoran Pemerintah daerah	0	0	3 Unit	8.784.700.000
Pembangunan Air Limbah Setempat	Terwujudnya pengelolaan limbah masing-masing rumah tangga	0	0	150 Unit	6.000.000.000
Rehabilitasi bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai	0	0	7 Unit	6.188.068.940
Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Bertambahnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	10 Unit	5.365.000.000
Pembangunan Tribun lapangan	Bertambahnya jumlah tribun lapangan kecamatan	0	0	2 Unit	1.323.000.000
Penyusunan data Base Limbah	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data base Air Limbah	0	0	0	0
Pembangunan Tempat Ibadah	Bertambahnya Sarana Infrastruktur Peribadatan	0	0	1 Unit	7.280.000.000
Master Plan Drainase	Tersedianya dokumen master Plan Drainase	0	0	1 Dokumen	700.000.000
Pengelolaan IMB	Terwujudnya pelayanan Pengelolaan izin Mendirikan bangunan	0	0	1 Kegiatan	150.000.000
Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Perkantoran	Terwujudnya Pembangunan Sistem IPAL di kawasan Perkantoran	0	0	1 Unit	800.000.000
Penyusunan Dokumen harga Satuan bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya dokumen teknis HSBGN	0	0	2 Dokumen	25.000.000

Pembangunan MCK Komunal	Tersedianya MCK Komunal di Permukiman	0	0	4 Unit	1.200.000.000
Pembangunan drainase	Bertambahnya panjang saluran Drainase Permukiman	0	0	1993 Meter	7.147.600.000
Pembangunan jalan Lingkungan	Bertambahnya Panjang Jalan Lingkungan bagi Permukiman	0	0	1750 Meter	2.372.760.000
Pembangunan Trotoar	Bertambahnya panjang jalan lingkungan bagi permukiman	0	0	3410 Meter	3.921.480.000
Pemeliharaan Drainase	Meningkatnya pelayanan saluran drainase permukiman	0	0	1500 Meter	1.224.000.000
Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS)	Bertambahnya kelompok masyarakat peduli sanitasi	0	0	5 Desa/ kawasan	2.000.000.000
Perencanaan Air Bersih	Bertambahnya dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	0	0	1 Dokumen	300.000.000
Pemeliharaan Trotoar	Terlaksananya pemeliharaan trotoar dalam kota	0	0	1500 Meter	618.000.000
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Bertambahnya Layanan dasar air minum bagi pedesaan	0	0	13 Unit	15.808.000.000
Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R	Tersedianya Infrastruktur Pengelolaan Sampah 3R	0	0	4 Desa/ Kelurahan	2.600.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Bertambahnya Sarana Infrastruktur Olah Raga	0	0	3 Unit	3.712.000.000
DAK Reguler Bidang Sanitasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0	0	6 Unit	2.865.254.650
Pengadaan Lahan TPA baru	Bertambahnya lahan TPA baru	0	0	0	0

DAK Penugasan Bidang Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	1 Unit	1.463.940.000
Perencanaan DED Sanitary Landfill TPA baru	Tersedianya Dokumen DED yang Bersanitary landfill TPA baru	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA baru	Bertambahnya Dokumen Lingkungan Untuk TPA baru	0	0	0	0
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0	0	42 Unit	3.125.747.800
Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM perkotaan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	1 unit	10.789.000.000
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Terlaksananya pembanguan system penyediaan air minum	0	0	15 Unit	1.868.000.000
National Urban Water Supply (NUWS)	Bertambahnya kelompok masyarakat peduli sanitasi di perkotaan	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya pembangunan system penyediaan air minum	0	0	10 Unit	2.000.000.000
Hibah Air Minum Pedesaan	Bertambahnya layanan dasar Air Minum Bagi Pedesaan	0	0	0	0
Hibah Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	0	0	1 Unit	650.000.000
IV. Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	0	0	62,30 %	375.729.440
	Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	0		91,72 %	

Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharanya Alat-Alat Berat	0	0	12 Unit	607.200.000
Pemsangan PJU Baru	Bertambahnya Jumlah PJU	0	0	60 Buah	1.560.000.000
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	0	0	2 Buah	7.210.000.000
Pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	0	0	36,93 Km	3.000.000.000
Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	0	0	1315 Buah	1.840.000.000
Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan	0	0	1 Dokumen	250.000.000
Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	0	0	6 Buah	650.000.000
Pemeliharaan Alat-Alat laboratorium Kebnamargaan	Jumlah Alat-Alat Laboratorium yang siap pakai	0	0	79 Unit	30.000.000
Peningkatan kapasitas laboratorium	Jumlah pengujian yang bersertifikasi	0	0	7 Parameter	350.000.000
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan	0	0	1 Dokumen	650.000.000
DAk Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	0	0	48.05 Km	82.400.000.000
Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	0	0	24.05 Km	25.750.000.000
Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	0	0	1 Ruas	1.500.000.000
V. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	0	0	70,46 %	71.928.040.000
Penaganan DAS dan Pengendalian Banjir	Jumlah pelaksanaan normalisasi sungai dan pengendalian banjir	0	0	1500 Meter	3.210.000.000
Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi dan bangunan air	0	0	32 DI	4.662.000.000

DAK Bidang Irigasi	Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi	0	0	30 DI	57.650.130.000
Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi	0	0	11 DI	4.345.580.000
Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	0	0	415 Buah	321.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Terlaksananya pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan irigasi yang optimal	0	0	32 DI	335.000.000
Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan irigasi	0	0	1 Dokumen	40.000.000
Pemeliharaan Sumber Daya Air lainnya	Terpeliharanya Infrastruktur bangunan Air Lainnya	0	0	400 Meter	800.000.000
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan irigasi	0	0	1 Dokumen	564.330.000
VI. Program Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	100 %	5.784.254.950
	Rasio Ruang terbuka Hijau Per Satuan Luas wilayah Ber HPL/ HGB	0		0,05 Ha	
Penyusunan master Plan Ruang terbuka Hijau kawasan Perkotaan Sinjai	Jumlah Dokumen Tentang Penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sinjai	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	0	0	1 Kecamatan	150.000.000
Penyusunan RDTR dan Kawasan Zonasi Kawasan Perkotaan Bikeru Kec. Sinjai Selatan	Banyaknya Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0	0	0	0
Pembuatan Papan Informasi Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Jumlah Papan Informasi Yang terkait	0	0	33 Titik	35.000.000

	Perencanaan Tata Ruang				
Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen Kawasan yang dipetakan secara detail	0	0	1 Dokumen	100.000.000
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mannanti Kec. Tellulimpoe	Banyaknya Dokumen Hasil penyusunan rencana Detail Tata Ruang kawasan	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah areal Pemakaman yang Tertata	0	0	1 Kelurahan	1.000.000.000
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Manipi Kec. Sinjai Barat	Banyaknya Dokumen hasil Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0	0	0	0
Penyusunan DED Pemakaman	Jumlah Dokumen Design Area Pemakaman	0	0	2 Desa/ Kelurahan	50.000.000
Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mannanti Kec. Tellulimpoe	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0	0	0	0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Areal Pemakaman yang terpelihara	0	0	1 Lokasi	150.000.0000
Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Keasan perkotaan Bikeru Kec. Sinjai Selatan	Jumlah Perda RDTRK, RTRK tentang Perencanaan Ruang	0	0	0	0
Pembuatan Peta Analog Kawasan Perkotaan Sinjai	Jumlah Peta Analog RDTR Kawasan Perkotaan	0	0	2 Kelurahan/ Desa	120.000.000
Pembangunan RTH Kawasan Olah raga Stadion Mini	Persentase Lokasi penataan dan Pembangunan taman Kota	0	0	0	0
Revisi Rencana tata Ruang wilayah (RTRW)	Banyaknya Dokumen hasil revisi tata Ruang Wilayah 9RTRW)	0	0	1 Dokumen	1.500.000.000
Pembuatan Peta Digital Kabupaten Sinjai	Jumlah Peta digital Kabupaten Sinjai	0	0	0	0

Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	0	0	2 laporan	79.254.950
Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan Tanassang	Persentase lokasi penataan dan pembangunan RTH kawasan	0	0	0,04%	2.000.000.000
Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Bikeru Kec. Sinjai Selatan	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	0	0	0	0
Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Sinjai	Banyaknya Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Sinjai	0	0	1 Dokumen	300.000.000
Penataan keasrian dan estetika Kota	Jumlah ruang terbuka hijau di ibukota kecamatan	0	0	0,5 Ha	150.000.000
Pemeliharaan RTH Taman Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	0	0	3 Lokasi	150.000.000
Penataan dan Pembangunan Taman Kota	Persentase lokasi penataan dan pembangunan taman kota	0	0	0	0
VII. Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan jasa Konstruksi	0	0	20 BUJK	970.000.000
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	0		200 Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Pengawasan Jasa Konstruksi	0		1 Layanan Informasi	
Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah peraturan perundangan bidang jasa konstruksi yang disusun tingkat kabupaten	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0	0	2 Kali	65.000.000
Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Kartu Penanggungjawab	0	0	63 BUJK	80.000.000

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018 | **BAB III**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Teknik Badan Usaha				
Penyusunan Bahan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pembinaan Jasa Konstruksi	0	0	3 Materi	75.000.000
Penyuluhan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Yang diberikan Penyuluhan	0	0	20%	80.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang ter Up-Date	0	0	1 Layan	55.000.000
Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	0	0	2 Kali	400.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tercapai	0	0	1 Layanan	55.000.000
Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK Melaksanakan Paket Pekerjaan Kkonstruksi Yang Diawasi	0	0	20%	80.000.000
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUJK	Jumlah BUJK yang berkualitas minimal K2	0	0	0	0

Sumber : Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dan Ranwal Renstra 2018-2023 di Sippadai

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, disusun sebagai upaya untuk mencapai visi misi PD yang telah disinkronisasikan dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu 1 (satu) Tahun mendatang seperti yang tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Pedoman dan arahan dimaksud adalah untuk mendukung tercapainya pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai bentuk tanggungjawab bersama, dalam rangka pencapaian pembangunan daerah perlu peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Karena keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, dan swasta, serta aparatur pemerintah, disamping itu kerjasama yang intensif antara PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat juga sangat menentukan.

Sinjai, 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Sinjai

Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196510251992031009

